

KEPENTINGAN OMAN SEBAGAI TUAN RUMAH ASIAN BEACH GAMES II MUSCAT TAHUN 2010

Oleh:

Ardiansyah

ardiansyahzn@yahoo.com

Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.S,i

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/fax.
0761-63277**

Abstract

This research describes the interest of Oman to create a Asian Beach Games II in Muscat 2010. Conflict politics, social and security in Middle East has been influence to region generally and to Oman. This conflict influence the bad image of Oman in international world.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze interest of Oman to create a Asian Beach Games II in Muscat 2010. The theories applied in this research are realisme perspective, national interest concept from Donald. E. Nuchterlain.

The research shows that interest of Oman to create a Asian Beach Games II in Muscat 2010 to move the bad image of Oman to international world. To erased this image Oman create a Asian Beach Games II in Muscat 2010

Key words: *interest, image, diplomacy and Asian Beach Games*

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah kajian diplomasi internasional yang menganalisis mengenai Kepentingan Oman menyelenggarakan Asian Beach Games II Muscat tahun 2010. Secara khusus penelitian ini difokuskan pada alasan dan tujuan Oman menyelenggarakan Asian Beach Games II tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan hubungan kondisi yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai kepentingan Oman menjadi tuan rumah Asian Beach Games II di Muscat tahun 2010.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnl, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 2010 pada masa dilaksanakannya Asian Beach Games II. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan

suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan pendekatan realis yang mempunyai tema *Struggle for power and security*. Hubungan internasional ditandai dengan anarki, segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Morgenthau menyatakan bahwa *super power* adalah fokus utama hubungan internasional, *power* adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*).¹ Perspektif Realis memiliki tiga asumsi dasar. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini, hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor keamanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional.

Asumsi kedua adalah dari pendekatan politik dan keamanan yaitu dengan cara menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga adalah adanya hirarki yang

¹ Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf. Hlm 25

jas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional. Penelitian ini difokuskan pada kajian diplomasi dengan menggunakan teori analisa kebijakan luar negeri oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, teori-teori yang berhubungan dengan diplomasi dan juga power sebagai kekuatan nasional yang merupakan konsep pendukung dari suatu proses pelaksanaan diplomasi.

Tingkat analisa yang digunakan adalah negara bangsa (*nation state*) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku negara bangsa, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Tingkat analisa bangsa dipakai dalam menjelaskan kebijakan yang sudah tercipta yang mewakili sebuah negara. Tingkat analisa ini mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi kehidupan dunia. Negara relatif bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti.² Maka dari itu Oman sebagai sebuah negara yang berdaulat memperlihatkan kemampuan dan hasil dari kegiatan itu.

Analisa manuver diplomatik dan tindakan-tindakan diplomatik negara lain dapat dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri.³ Kondisi dalam negeri menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai

melalui jalur diplomasi. Menggunakan tingkat analisa negara bangsa dengan menitikberatkan pembahasan pada kepentingan Oman menjadi tuan rumah Asian Beach Games tahun 2010.

Level analisa berasal dari anggapan bahwa perilaku setiap negara sebenarnya bergantung pada perilaku negara lainnya dalam sebuah sistem internasional. Untuk menerangkan sistem yang abstrak ini bisa dipakai analogi yang lebih sederhana yaitu sistem sirkulasi tubuh manusia, yang terdiri dari nadi, arteri, organ dan sel - sel yang secara keseluruhan harus bekerja dan berfungsi secara baik untuk kelancaran dalam sistem dan akhirnya menghasilkan tubuh yang sehat dan performa yang baik. Demikian juga dunia internasional, ia juga memiliki sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain.⁴

Interaksi antarnegara dalam paradigma hubungan internasional banyak ditentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut merupakan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Politik luar negeri ini merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi, dan hal tersebut lazimnya disebut kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri merupakan mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan.

² Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power, Bandung: Putra Abardin, 1990, hal 127

³ Mohtar Mas'ood. Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi. LP3ES, Yogyakarta. 1990. Hlm 45

⁴ K J. Holsti. Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis. 1992. Bandung: Binacipta. Hlm. 16

Setiap negara di dalam sistem politik internasional bertanggung jawab terhadap keamanan dan kemerdekaannya sendiri (*Struggle for power*), kedudukan negara lain dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingannya yang mendasar. Maka secara umum, negara-negara merasa tidak aman sehingga timbul rasa ketakutan dan ketidakpercayaan satu sama lain. Mereka menjadi sangat fokus dengan kekuatannya masing-masing dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyerangan oleh negara lain.

Peneliti menggunakan teori diplomasi kebudayaan. Kebudayaan secara makro dapat diartikan sebagai: keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.⁵ Dalam arti mikro, kebudayaan biasanya termanifestasikan dalam pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan dan olahraga. Dengan demikian Diplomasi Kebudayaan dapat diartikan sebagai:

“Usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri khas yang utama, misalnya: propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi ataupun militer.”⁶

⁵ Kuntjaraningrat, Pengantar Antropologi Budaya, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal. 193

⁶ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Sedang Berkembang: Studi Kasus Indonesia, Ombak, Yogyakarta, 2007, hal. 4.

Dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan, diperlukan adanya aktor atau para pelaku. Aktor dan pelaku diplomasi kebudayaan biasanya dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah, individu maupun kolektif, atau setiap negara sehingga pola yang terjadi berupa hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan swasta, swasta dengan pribadi, pribadi dengan pribadi, maupun pemerintah dengan pribadi.

Sedangkan tujuan dari diplomasi kebudayaan itu sendiri adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi adalah antara masyarakat (suatu negara tertentu) dengan masyarakat (negara lain). Dengan demikian, pendapat umum yang dimaksud disini adalah guna mempengaruhi *policy* pemerintah dari masyarakat yang bersangkutan.⁷

Sasaran dari diplomasi itu sendiri adalah pendapat umum, baik pada level nasional (dari suatu masyarakat negara bangsa tertentu) maupun internasional, dengan harapan pendapat umum tersebut dapat mempengaruhi para pengambil keputusan pada pemerintah atau organisasi internasional.

Secara makro, diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk didalamnya adalah pemanfaatan

⁷ Ibid. Hlm 32

bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lain dalam percaturan masyarakat internasional.⁸

Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik luar negeri. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.⁹ Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.¹⁰

Dengan kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest maupun latent yang meliputi segala sumber daya yang melekat pada bangsa yang bersangkutan.

Strategi politik luar negeri adalah output. Sedangkan input berasal dari kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan intern yang dikonversi menjadi input, melalui proses pemahaman situasi yang dikaitkan dengan penentuan tujuan yang akan dicapai, mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya-upaya nyata

dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan.¹¹

Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Setiap negara merumuskan kebijakan politik luar negeri, tetapi tidak akan mungkin mengatur dan menetapkan proses dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antara bangsa-bangsa di dunia. Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai yang terdapat dalam sistemnya.¹²

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.¹³

Dalam pembuatan kebijakan atau keputusan disini, para pembuat keputusan atau pemerintah tidak dengan begitu saja memutuskan. Setidaknya ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Berikut adalah langkah utama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri, yaitu:¹⁴

⁸ Ibid. Hlm 21

⁹ Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Remaja Rosdakarya, Bandung 2005 hal 35.

¹⁰ Perwita dan Yani, Pengantar Hubungan Internasional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2005 hal 47

¹¹ K.J. Holtsi, Politik Internasional : Kerangka Analisis Pedoman Ilmu, Jakarta, 1987, hal 88.

¹² Ibid, Hal. 133

¹³ Jack C. Plano. Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional" cetakan kedua , penerbit Putra A Bardin, cv 1999. hal 5-6

¹⁴ Ibid. Hlm 16

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk dan tujuan yang spesifik.
2. Menetapkan faktor yang situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Untuk mengkaji kepentingan Oman dalam Asian Beach Games, maka penulis merujuk pada tulisan yang dipaparkan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dalam buku *International Rrealtion and World Politics Security, Economy, Identity (second sedition, Viotti dan Kauppi)*. Dikatakan bahwa dikeluarkannya sebuah kebijakan atau keputusan sebuah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Karena kepentingan saja tidak cukup untuk dapat menuntun didalam pembuatan suatu keputusan, tetapi hal ini didukung dengan adanya tujuan spesifik atau objektivitas. Viotti dan Kauppi menambahkan bahwa yang menjadi dasar pendorong dikeluarkannya objektivitas sebagai produk keputusan ada empat hal, yaitu:

1. *Capabilities* (Kemampuan)

Didalam pembentukan objektivitas kebijakan luar negeri, pembuatan keputusan melihat kepentingan nasional sebagai hal mendasar serta ancaman dan peluang yang mana hal tersebut berasal dari sistem internasional. Namun, beberapa bukti memperlihatkan adanya kemampuan dan kekuasaan dari dalam negeri yang mendorong tercapainya keputusan.

2. *Interest* (kepentingan)

Seperti yang diketahui, didalam suatu negara yang berbentuk demokrasi atau diktator, setiap kebijakan yang dikeluarkan negara tersebut biasanya didasarkan pada beberapa hal, pertama: status kedaulatan. Jika suatu negara membangun sebuah kebijakan luar negeri, hal tersebut dapat diraih dengan menggunakan kedaulatannya. Kedua, mempertahankan kesejahteraan dan kepentingan ekonomi negaranya. Kepentingan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai sumber yang penting bagi kekuatan dalam hubungan antar bangsa. Ketiga: pemeliharaan nilai-nilai penting yang ada dalam masyarakat.

3. *Opportunities* (Peluang)

Didalam pencapaian objektivitas sebuah negara, sistem global tidak hanya dilihat sebagai ancaman kepentingan nasional, tetapi juga menjadi peluang yang dapat mempengaruhi pembuatan objektivitas kebijakan luar negeri suatu negara. Ini dapat di lihat dari beberapa negara dalam ekspansi pasar dan investasi ekonomi.

4. *Threats* (ancaman)

Dalam pencapaian objektivitas nasionalnya, sistem global merupakan tekanan yang juga mempengaruhi dalam perumusan keputusan sebuah negara.

Ancaman bisa dilihat sebagai ancaman secara terang-terangan kepada suatu negara atau hanya ancaman tidak langsung.

Berdasarkan teori tersebut, maka kepentingan Oman menyelenggarakan Asian Beach Games II di Muscat tahun 2010 adalah faktor kemampuan dan kepentingan Oman. Kemampuan sendiri diartikan Oman memiliki kemampuan baik dibidang sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan Asian beach Games II pada tahun 2010 lalu. Selain itu dengan adanya penyelenggaraan Asian Beach games maka Oman dapat menggunakan even ini sebagai sarana penyampaian kepentingannya kepada dunia internasional untuk menggambarkan citra atau *image* Oman yang lebih baik di mata dunia internasional

Hasil dan Pembahasan

Asian Beach Games merupakan ajang 2 tahun sekali yang dibentuk oleh Asian Olympic Council yang memutuskan melaksanakan olahraga pantai ini yang diikuti oleh negara-negara kawasan Asia. Pelaksanaan Asian Beach Games ini pertama kalinya dilakukan di Bali pada tahun 2008.

Asian Beach Games yang pertama dan diadakan di Bali, Indonesia pada 18 hingga 26 Oktober 2008. ABG 2008 diikuti oleh 45 negara dan wilayah di seluruh penjuru Asia. Asian Beach Games ini adalah ajang multi-olahraga tingkat Asia ke-2 yang diselenggarakan Indonesia setelah Asian Games 1962. Walaupun begitu, terpilihnya Oman sebagai tuan rumah awalnya tidak diajukan oleh Indonesia sendiri, padahal ada 6 negara lain yang tertarik untuk menyelenggarakan pesta olahraga ini.

Maka Asian Beach Games II ini adalah suatu kehormatan tersendiri bagi Oman, khususnya bagi Kota Muscat. Untuk memeriahkan Asian Beach Games perdana, panitia Asian Beach Games Oman menyelenggarakan Kirab Obor yang akan memulai prosesinya dari Indonesia menuju Oman dan di gunung tersebut, obor akan disulut dan dinyalakan dengan bantuan gas alam.

Obor tersebut akan dibawa ke ibukota Muscat dan diberikan kepada Sultan Oman yaitu Sultan Badros dan kemudian diarak keliling pulau melintasi wilayah pantai Oman. Prosesi kirab obor akan melibatkan 45 pembawa obor per wilayahnya. Para pembawa obor tersebut berasal dari dunia olahraga, mulai dari atlet lokal, atlet nasional, atlet internasional, pelatih, hingga ofisial. Prosesi kirab obor juga semakin meriah dengan 2,000 orang yang akan turut serta memeriahkannya.

Kirab obor juga bertujuan untuk menunjukkan kebudayaan Oman yang unik, terutama kebudayaan kesultanan Oman pada dunia internasional, terutama pada negara Asia lainnya. Prosesi kirab obor akan berakhir di ujung Kota Muscat saat Asian Beach Games dibuka secara resmi oleh Presiden Sultan Badros. Api Abadi disulutkan oleh Oka Sulaksana dengan diiringi kebudayaan tradisional Oman.

Upacara pembukaan Asian Beach Games 2010 diadakan di Kota Muscat pada pukul 19.00. Selain Sultan Oman beserta permaisuri, hadir pula tamu-tamu penting lainnya seperti presiden IOC dan Ketua Olympic Council Of Asia. Upacara pembukaan dimeriahkan oleh 3 Asian Divo yaitu Andre Hehanusa (Indonesia), Christian

Bautista (Filipina) dan Mark Lazaro (India) menyanyikan lagu To Be One. Lagu tema Asian Beach Games 2008 dinyanyikan oleh Reza Artamevia berjudul Inspire The World.

Penyelenggaraan Asian Beach Games II di Oman Muscat dilakukan sesuai hasil rapat Olympic Council of Asia (OCA) yang ke-24 di Guangzhou, China tanggal 9 September 200, Oman ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia di Muscat (Asian Beach Games) Tahun 2010, yang merupakan event pertama kali diselenggarakan di tingkat Asia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Oman mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia (Asian Beach Games) Tahun 2010 yang akan diselenggarakan di Oman pada bulan Oktober 2010. Oleh karena itu, Pemerintah Oman perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia di Oman (Muscat Asian Beach Games Organizing Committee) Tahun 2010. Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia di Oman (Muscat Asian Beach Games Organizing Committee) Tahun 2010 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut dengan Panitia Nasional Muscat Asian Beach Games 2010.

Kepentingan Oman menjadi tuan rumah dalam Asian Beach Games II tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Konflik beruntun yang menimpa Timur Tengah oleh banyak pihak dilihat sebagai peristiwa tumbangnya

pemerintahan otoriter yang tidak disukai oleh rakyat. Maka wajar jika wacana yang timbul kemudian adalah tuntutan politik untuk melakukan perubahan rezim.

Sampai saat ini masih terjadi perdebatan dalam konflik yang terjadi apakah benar bahwa pemicu konflik tersebut adalah murni karena rakyat sudah tidak tahan terhadap rezim yang selama ini ada atau ada faktor lain yang melatarbelakangi konflik di wilayah yang kerap disebut sebagai "*Middle East Exceptionalism*" tersebut. Konflik penggulingan rezim yang pertama kali terjadi di Tunisia perlahan menyebar kepada negara-negara tetangga dalam lingkup kawasan Timur Tengah. Daftar tunggu letusan konflik pun lumayan mendebarakan pemimpin-pemimpin Yaman, Bahrain, Suriah, Jordania dan bahkan Aljazair. Ketegangan eskalasi politik dengan akhir kekacauan pun sudah mulai terasa di Maroko dan juga Oman.

Menjadi penting untuk melihat apa yang terjadi di Timur Tengah dari berbagai sudut pandang. Sejarah panjang kawasan Timur Tengah sangat berbeda dibandingkan dengan kawasan di belahan dunia lain. Secara geografis wilayah yang sebagian besar berupa padang pasir itu menyimpan emas hitam yang berlimpah tersimpan di bawah tanahnya yang gersang. Hal itulah yang merubah secara drastis pola kehidupan masyarakatnya ketika emas hitam pertama kali ditemukan.

Selain itu konflik yang terjadi adalah fenomena konflik antar masyarakat dalam bentuk manifest banyak tercermin ke dalam negara-negara dengan basis republik dibandingkan dengan negara-negara berbasis kerajaan. Hal ini disebabkan angka

indeks demokrasi di negara berbasis republik lebih besar dibandingkan dengan negara kerajaan, meski masih banyak ditemui bahwa negara yang basis Republik-pun, indeks demokrasinya relatif masih kecil.

Negara yang memiliki indeks terbesar dimiliki oleh Israel yang mencapai angka 8. Sedangkan konflik di tingkat negara-negara berbasis kerajaan relatif bersifat latent, di mana regim selama ini masih mampu mencegah konflik secara manifest melalui instrumen pembangunan kesejahteraan masyarakat dari hasil-hasil insutri minyak.¹⁵

Akibat dari konflik yang dilatentkan dan akumulatif tersebut maka begitu terjadi konflik maka berkecenderungan melahirkan konflik yang unik dan khas berupa tindakan kekerasan yang masif. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai peristiwa yang terjadi di Israel, Palestina, Iraq, Suriah, Yordania, Arab Saudi sering terdapat ekspresi ketidaksukaan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa dalam bentuk aksi kekerasan. Israel yang diyakini sebagai negara yang demokratis terhadap warganya ternyata juga tetap melahirkan reaksi kekerasan yang berakibat pembunuhan terhadap PM Yitzak Rabin.

Konflik yang juga sangat marak sekarang ini adalah konflik di Iraq, di mana pemerintah yang berkuasa dianggap tidak memiliki legitimasi yang kuat bahkan dituding sebagai boneka Amerika Serikat,

sehingga konflik antara masyarakat dengan pemerintah sangat besar.

Kasus di Arab Saudi sekarang ini juga menunjukkan pola-pola peningkatan konflik antara masyarakat dengan negara. Kelompok al-Qaeda yang merupakan kelompok yang berbasis di Arab Saudi merupakan kelompok yang sangat kritis kepada regim Saud, sehingga pada tahun 1993 kelompok ini dibubarkan dan dilarang aktivitasnya di Saudi. Pemimpinnya Usamah bin Laden dideportasi dari Arab Saudi. Namun juga tak bisa dipungkiri meskipun mendapatkan tindakan represif dari pemerintah Arab Saudi kelompok ini masih sering melakukan aksi perlawanan kepada kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Selain beberapa konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah tersebut, maka beberapa faktor lainnya yang juga berpengaruh dalam konflik yang terjadi di wilayah negara Oman sendiri adalah konflik pemberontakan oleh kelompok Ibadi.

Kelompok Ibadi adalah kelompok aliran pemikiran yang mencoba melawan pemerintahan Kesultanan di Oman. Kelompok ini melakukan perlawanan dikarenakan pemerintahan Sultan berdasarkan kehendak kesultanan. Selama satu periode, Oman pernah menjadi salah satu kekuatan di wilayahnya. Hal itu ditandai dengan kesultanan Oman yang berkuasa melintasi Selat Hormuz hingga ke Iran. Kesultanan Oman pun pernah berkuasa di daerah yang kini menjadi Negara Pakistan. Selain itu, Kesultanan Oman pun pernah berkuasa hingga Zanzibar di pesisir tenggara Afrika.

Seiring waktu berjalanm kekuatan Kesultanan Oman semakin meluntur.

¹⁵ Lihat index demokrasi negara di Timur Tengah dalam Dhurorudin Mas'ad dkk, Prospek Kerjasama Ekonomi-Politik Indonesia Timur Tengah, Jakarta, LIPI, 1997

Menurunnya kekuatan Kesultanan Oman ditandai dengan adanya pengaruh kuat dari Britania Raya di dalam tubuh Kesultanan Oman, meskipun Oman secara tidak resmi pernah menjadi bagian dari Imperium Britania dan Protektorat Britania. Oman pernah dikuasai oleh Dinasti Al Said sejak 1744 dan telah menjalin hubungan militer dan politik dengan Britania Raya dan Amerika Serikat, meskipun Oman memiliki kebijakan luar negeri yang bebas.

Dalam Kesultanan Oman, hukum Islam menjadi hukum Negara. Sementara itu, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang Perdana Menteri. Oman menjadi bagian dari sejarah perkembangan Islam di Jazirah Arab. Masjid pertama yang didirikan di Oman diperkirakan dibangun pada 1300 masehi. Masjid tersebut ditemukan dalam kondisi reruntuhan. Reruntuhan masjid tua itu ditemukan di wilayah Qalhat di timur laut Oman oleh ekspedisi arkeologi gabungan antara Oman dan Prancis pada 2011 lalu. Diperkirakan, masjid tua tersebut dibangun oleh Bibi Maryam dan dihancurkan oleh kolonial Portugis pada 1508.

Seiring berjalannya waktu, kondisi Oman pun menjadi lebih stabil. Pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan sektor ekonomi. Selain itu, meningkatkan hubungan diplomatic dengan berbagai Negara, khususnya Negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Kelompok pemberontak di Oman yang merupakan tergabung dalam kelompok pemberontak Ibadi ini merupakan suatu kelompok atau gerakan separatis yang menginginkan memisahkan diri dan keluar dari pemerintahan Sultan Oman. Mereka

menganggap pemerintahan Sultan Oman sudah melenceng dari nilai-nilai keislaman.

Beberapa pergerakan yang dilakukan oleh kelompok Ibadi ini adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan secara tersembunyi dan melakukan penanaman ideologi kepada warga dan generasi muda Oman untuk mulai berani melawan pemerintahan Sultan Oman. Oleh karena itu, menghadapi gerakan pemberontak Ibadi tersebut, Sultan Oman menggunakan kekuatan militer dengan cara menangkap dan membunuh kelompok Ibadi ini yang bertujuan untuk melawan pemerintahan Kesultanan Oman. Sehingga cara ini tentu saja berpengaruh kepada kondisi politik dan keamanan Oman dan mengakibatkan kondisi dan situasi keamanan di Oman menjadi tidak stabil dan tentu saja berpengaruh pada investor-investor yang akan menanamkan modalnya atau berinvestasi di negara Oman, terutama dalam pelaksanaan Asian Beach Games II di Muscat tahun 2010.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan Oman menjadi menyelenggarakan Asian Beach Games II Muscat tahun 2010 adalah untuk pemulihan citra Oman di dunia internasional yang diakibatkan oleh perang saudara dan konflik politik di wilayah Timur Tengah, beberapa konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah seperti konflik antara Amerika dan Iran berdampak pada keamanan regional Timur Tengah dan konflik antara Israel dan Palestina serta konflik politik di Mesir, Suriah dan Iraq berdampak pada keamanan regional Timur Tengah. Selain itu juga munculnya kelompok pemberontak atau

gerakan separatis Ibadi di Oman juga berpengaruh pada stabilitas keamanan dan investasi ekonomi di Oman. Hal ini dikarenakan Pemerintah Oman menggunakan kekuatan militer untuk memberantas gerakan separatis atas kelompok Ibadi, sehingga juga berpengaruh pada keamanan di Oman.

Oleh karena itu dengan beberapa kejadian dan konflik yang terjadi di kawasan ini, maka hal ini tentu saja berdampak pada citra atau *image* Oman yang buruk wilayah Timur Tengah sehingga Oman menyelenggarakan Asian Beach Games II di Muscat Tahun 2010. Dan penyelenggaraan Asian Beach Games II sebagai sarana diplomasi oleh Pemerintah Oman dalam memulihkan citra Oman dari konflik Timur Tengah Pemerintah Oman mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hans Morgenthau. 1973. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. New York: Knopf.
- Jack C. Plano. Roy Olton, 1999. “*Kamus Hubungan Internasional*” cetakan kedua, Penerbit Putra A Bardin.
- K J. Holsti. 1992. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.

_____, 1987. *Politik Internasional : Kerangka Analisis Pedoman Ilmu*, Jakarta.

Kuntjaraningrat, 1979. *Pengantar Antropologi Budaya*, Aksara Baru, Jakarta.

LIPI. 1997. *Index demokrasi negara di Timur Tengah dalamDhurorudin Mas’ad dkk, Prospek Kerjasama Ekonomi-Politik Indonesia Timur Tengah*, LIPI. Jakarta.

Mohtar Mas’oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.

Perwita dan Yani, 2005. *Pengantar Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, 1990. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin.

Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, 2007. *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Sedang Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, PT Ombak, Yogyakarta.